

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2014, *Bab-Bab tentang Perolehan & Hapusnya Hak atas Tanah Edisi Pertama*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ismail,Dian Ekawaty, 2019, *Hukum Tata Ruang: Rekonstruksi Menuju Permukiman Indonesia Bebas Kumuh*, UII Press, Yogyakarta.
- Ismaya, Samun, 2018, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G., 1998, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Murniatmo, Gatut, dkk, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Moedjanto, G., 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P., 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, Juniarto, dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, TuguJogja Pustaka, Yogyakarta.
- Setyawati, Nur Aini, *Sengketa Tanah Kasultanan Setelah Reorganisasi Agraria*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Silalahi, M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya.
- Sosiawan, Rasyid Ratnadi, 2009, *The Management of Sultan Land (SG) in Yogyakarta for The Accomplishment of Legal Certainty: A Case Study in Sleman Regency*, Graduate School Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahid, A.M. Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1127).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 501).
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1).
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1).

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Astuti, Ajeng Peny, 2015, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menguasai Tanah Wedi Kengser (Tanah Timbul) di Kota Yogyakarta*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Batarayuda, Dedy, 2004, *Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo oleh Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Laporan, Edisi Peluncuran.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2019, *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria "Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan"*, Laporan, Edisi Peluncuran.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria "Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar"*, Laporan, Edisi Peluncuran I.

Maisyaroh, Siti, 2007, *Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Timbul*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Muftiah, Santi Rajma, 2008, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Land Management and Policy Development Project (LMPDP) di Kota Depok Propinsi Jawa Barat*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudjito, 1994, *Perkembangan Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta*, Laporan Penelitian, Proyek Off Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Setiawan, Andi Reza Fitriani Eru, *Perkembangan Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. Jurnal/Majalah

- Ilyani, Maulida, “Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22, No. 3, 2020.
- Kusumoharyono, Umar, “Eksistensi Tanah Kasultaan (*Sultan Ground*) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5/1960, *Jurnal Yustisia*, Vol. No. 68, Mei-Agustus 2006.
- Mujiburohman, Dian Aries, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, *Jurnal Bhumi*, Vol. 4, No. 1, Mei 2018.
- Rahmahsari, Novi Achmadiyah, “Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Suyitno, “Hak Atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta”, *Land*, November 2006-Januari 2007.
- Wicaksono, Dian Agung, dkk, “Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten”, *Jurnal Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2, November 2020.

E. Internet

- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Akan Sesuai Target”, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>, diakses tanggal 27 Desember 2019, pukul 17.03 WIB.
- Budiman, M. Asyief Khasan, “Legalisasi Status Haram Tanah Timbul”, <https://www.forestdigest.com/detail/246/legalisasi-status-haram-tanah-timbul>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 11.14 WIB.
- Jannah, Selfie Miftahul, “Berapa Juta Bidang Tanah Belum Bersertifikat? Ini Kata Menteri ATR”, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr>, diakses tanggal 27 Desember 2019, pukul 16.44 WIB.